



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2024**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/256/2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
25. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;

- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Rumah Sakit Umum Daerah Hanau;
- ll. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Setda Kalimantan Tengah;
- tt. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- uu. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Juli 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
Up. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Rankhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini mempunyai peran sangat penting dalam menentukan arah pembangunan bidang manajemen kepegawaian di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini disusun guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah sehingga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Demikian semoga dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ranwal RENJA SKPD) ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 4 Juli 2024

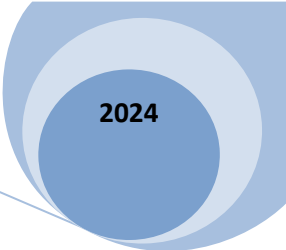


KESALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISDA YANA, S.Sos

Pada 4 Juli 2024
Utama Madya

NIP. 19680901 198911 2 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023	4
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	4
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	12
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	15
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	15
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT...	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	32
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	32
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	49



BAB I**PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa SKPD wajib menyusun Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melaksanakan tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah menetapkan Visi yaitu “Profesional Dalam Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian”.

Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2024. Renja SKPD tersebut memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
25. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja SKPD ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, review pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja SKPD ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2023)

- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2023) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
- 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

	2.5. PENALAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
	3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA TAHUN 2025
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

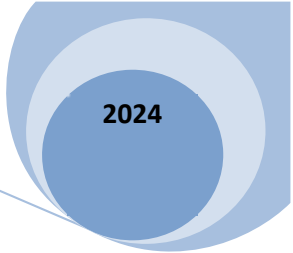
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2023 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.

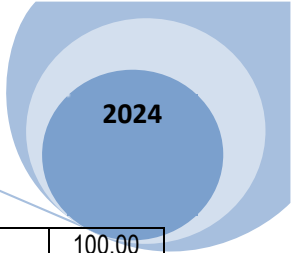
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Renja SKPD. Urusan Wajib yang dilaksanakan yaitu urusan Kepegawaian dengan melaksanakan 2 Program 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Rekapitulasi hasil capaian secara rinci disajikan dalam tabel 2.1.

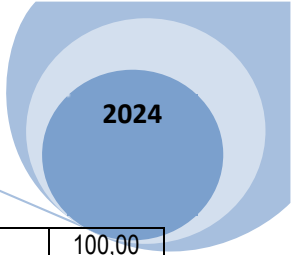


Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023

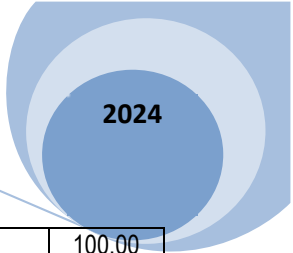
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2021		Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
					Target	Satuan	Target RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-3)	Tingkat Realisasi (%)	Target RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2020 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Satuan	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d triwulan I tahun 2021	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan I tahun 2021 (%)
	URUSAN PENUNJANG															
	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN															
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
5.03.01.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	7	Dokumen	5	5	100,00	5	5	100,00	7	Dokumen	7	100,00
5.03.01.1.01.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Realisasi Kinerja SKPD	10	Dokumen	10	10	100,00	10	10	100,00	10	Dokumen	10	100,00



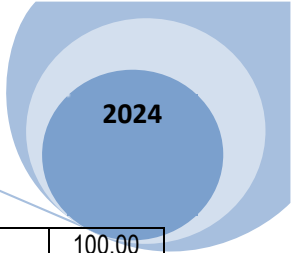
5.03.01.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	1	1	100,00	1	1	100,00	1	Tahun	1	100,00
5.03.01.1.02.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25	25	100,00	25	25	100,00	1	Laporan	1	100,00
5.03.01.1.02.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1	Laporan	25	25	100,00	25	25	100,00	1	Laporan	1	100,00
5.03.01.1.03.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarkannya Asuransi Aset SKPD	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai BKD	150	Stel	-	-		70	70	100,00	150	Stel	-	0,00
5.03.01.1.05.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang- undangan	100	Orang	50	50	100,00	-	0		100	Orang	-	0,00



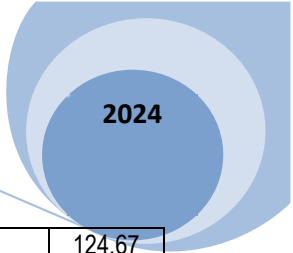
5.03.01.1.05.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas PNS mengikuti Bimtek	10	Orang	40	6	15,00	40	10	25,00	10	Orang	10	100,00
5.03.01.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.06.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.06.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.06.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.06.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00



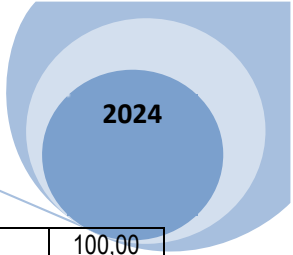
5.03.01.1.07.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi instalasi listrik kantor	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.08.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.08.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas bermotor milik SKPD	30	Unit	5	5	100,00	8	8	100,00	30	Unit	100	333,33



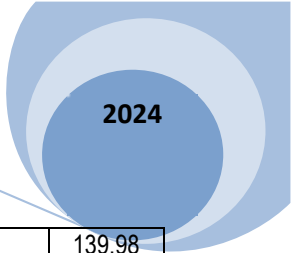
5.03.01.1.09.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.09.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100	Persen	100	100	100,00				100	Persen	100	100,00
5.03.01.1.09.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerinta han Daerah	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin AC milik SKPD	100	Persen	100	100	100,00				100	Persen	100	100,00
5.03.02.1.01.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Capra IPDN yang lulus tes	40	Orang	155	40	25,81	-	0		40	Orang	38	95,00



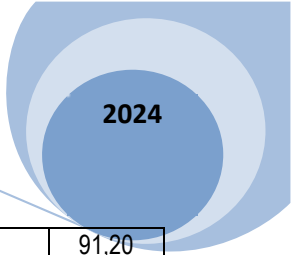
5.03.02.1.01.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK Provinsi yang lulus test	300	Orang	200	-	0,00	200	381	190,50	300	Orang	374	124,67
5.03.02.1.01.06	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	300	SK	145	298	205,52	300	337	112,33	300	SK	473	157,67
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan kebugaran jasmani PN	10	Kali	11	11	100,00	11	3	27,27	10	Kali	1	10,00
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian PNS	30	Kali	33	33	100,00	33	9	27,27	30	Kali	10	33,33
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Publikasi Hari KORPRI	1	Kali	1	1	100,00	1	1	100,00	1	Kali	-	0,00
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Rapat Kerja DPP KORPRI	1	Kali	1	1	100,00	-	0		1	Kali	-	0,00



5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya PPID BKD Provinsi Kalimantan Tengah	1	Laporan	1	1	100,00	1	1	100,00	1	Laporan	1	100,00
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertatanya dokumen kepegawaian PNS Provinsi Kalimantan Tengah	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpublikasinya Informasi Kepegawaian Secara Online	100	Informasi	-	-		-	0		100	Informasi	154	154,00
5.03.02.1.01.11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya dan terkelolanya Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang up to date	10000	Data PNS	9.000	10.059	111,77	9.000	9556	106,18	10000	Data PNS	9.596	95,96
5.03.02.1.01.11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya Program/Aplikasi Kepegawaian SiTaguh online Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1	Aplikasi	1	1	100,00	1	1	100,00	1	Aplikasi	1	100,00
5.03.02.1.02.01	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Assesmen Mutasi PNS	2	Kali	-	-		1	1	100,00	2	Kali	1	50,00



5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS naik pangkat periode April dan Oktober	4000	SK	2.100	3.413	162,52	2.100	2554	121,62	4000	SK	5.599	139,98
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II	400	Orang	400	449	112,25	400	1284	321,00	400	Orang	65	16,25
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	400	Orang	400	197	49,25	-	0		400	Orang	396	99,00
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Assesmen Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1	Kali	1	1	100,00	-	0		1	Kali	1	100,00
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural	1	Kali	1	1	100,00	1	1	100,00	1	Kali	2	200,00
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kali	1	1	100,00	1	1	100,00	1	Kali	1	100,00
5.03.02.1.03.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100	Persen	100	100	100,00	100	100	100,00	100	Persen	100	100,00
5.03.02.1.03.13	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional Yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	1000	SK	500	496	99,20	500	997	199,40	1000	SK	973	97,30



5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS penerima Satyalancana Karya Satya Provinsi Kalimantan Tengah	250	PNS	250	387	154,80	250	546	218,40	250	PNS	228	91,20
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang membuat SKP Eselon II Provinsi Kalimantan Tengah	44	Orang	44	44	100,00	44	44	100,00	44	Orang	44	100,00
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	2	Kegiatan	1	1	100,00	2	2	100,00	2	Kegiatan	1	50,00
5.03.02.1.04.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikannya laporan yang berkaitan dengan tindak disiplin PNS dan perceraian PNS	50	Laporan	20	28	140,00	20	34	170,00	50	Laporan	24	48,00

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

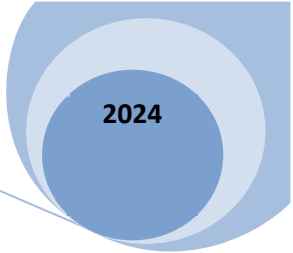
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
4. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
6. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
7. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
8. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

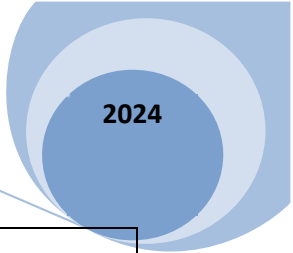
1. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
3. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN;
4. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
5. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
6. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data dan informasi kepegawaian daerah;
7. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kualitas ASN Daerah antara lain melalui pendidikan formal;
8. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah; dan
10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD, mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hal ini didapat dari Target Renstra SKPD dibandingkan dengan realisasi capaian SKPD. Tabel Capaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.2.



Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)
1	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		100	0	20	20	32	20	10	20	20	10	20	20		
2	Jumlah orang Lulus Ujian Penyesuaian ijazah		100	0	400	400	400	400	421	400	400	490	400	400		
3	Jumlah orang Lulus ujian dinas Tk.I dan II		100	0	400	400	400	400	429	400	400	348	400	400		
4	Jumlah orang usul naik pangkat melalui Kenaikan pangkat periode April dan Oktober		100	3400	2580	2580	2500	2500	3400	2580	2580	2580	2500	2100		
5	Jumlah orang lulus seleksi Praja IPDN		100	40	28	150	150	200	30	31	32	30	200	155		
6	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi		100	40	40	0	60	100	60	40	0	60	100	50		
7	Jumlah orang yang ditempatkan (Mutasi Jabatan/Mutasi Umum /Pelantikan Jabatan/ Sumpah Janji/Penyelesaian Pengangkatan CPNS		100	1300	700	700	700	700	833	700	700		700	700		
8	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek		100	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
9	Jumlah orang yang Lulus Seleksi Tugas Belajar /Seleksi Diklat PIM Seleksi KKD dan KKAD		100	360	447	525	50	100		447	525	0	100	100		
10	Jumlah orang yang menerima SKS/Cuti/Karis/Karsu/Askes/Tasp en/Bapertarum		100	1170	1170	1170	1220	645	1170	1170	1170	249	645	700		
11	Jumlah orang yang dijatuhi Hukuman Disiplin		100	10	10	10	15	10	17	10	10	13	10	10		
12	Jumlah orang yang menerima SKPensiun		100	0	200	200	200	200	238	230	208	37	200	200		
13	Jumlah orang /PNS yang ter entry/ter update datanya		100	200	200	150	7000	7000	100	200	150	4901	7000	9000		



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)
14	Jumlah orang yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional		100	0	360	160	0	0	0	360	160	0	0	0		
15	Jumlah orang yang mengikuti Rapat Koordinasi kepegawaian		100	16	115	75	0	50	16	115	75	0	50	50		
16	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	1	1	1	3	7	1	1	1	1	7	7		
17	Jumlah Rehab Pemeliharaan Kantor		100	1	1	1	4	3	1	1	1	1	3	3		
18	Jumlah Paket Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG		100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan berkenaan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian adalah :

"Rendahnya Kinerja Aparatur dalam Memberikan Pelayanan Kepada PNS dan Publik"

Hal ini berkaitan dengan beberapa permasalahan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah antara lain :

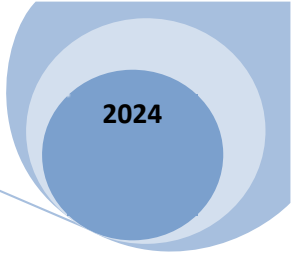
1. Adanya keluhan dari publik terkait pelayanan kepegawaian yang dirasa lambat dalam penanganan administrasi;
2. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur masih kurang, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pengembangan aparatur;
3. Pendidikan aparatur sebagian besar diperoleh melalui ijin belajar yang secara umum tidak dilaksanakan reguler melainkan sistem paket yang mempengaruhi kualitas SDM;
4. Lemahnya penguasaan teknologi informasi mengakibatkan sebagian besar aparatur belum mampu mengoperasikan teknologi tersebut;
5. Belum diangkat/ditempatkan aparatur sesuai formasi jabatan yang dilamar saat CPNS;
6. Rendahnya pengetahuan aparatur tentang pemberian pelayanan yang prima.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan akhir rencana kerja SKPD (Renja SKPD) 2025 ini merupakan penjabaran dari visi misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan diharapkan menjadi acuan dan panduan bagi penanggung jawab program baik lintas sektor maupun lintas program dalam melaksanakan kegiatan tahun 2025 sekaligus untuk dapat mengukur akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sehingga seluruh pemangku kepentingan dan penanggung jawab program dapat menilai tingkat keberhasilan program.

Berkaitan dengan maksud diatas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun 2025 ini sebagai berikut :

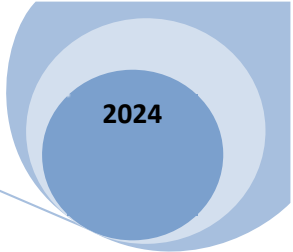
1. Renja SKPD tahun 2025 diharapkan menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan diseluruh bidang baik dalam menyusun kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi.
2. Dalam pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 ini, diharapkan selalu mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam pencapaian setiap output dan outcome kinerja Badan Kepegawaian Daerah baik lintas sektor maupun lintas program.
3. Apabila terdapat perubahan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan yang belum diakomodasikan dalam pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 dapat dimuthakirkan lagi sepanjang sudah dikonsultasikan dengan stakeholder terkait.
4. Harapan selanjutnya adalah semoga dengan tersusunnya Renja SKPD tahun 2025 ini, pembangunan dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih terarah dan terfokus.



Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

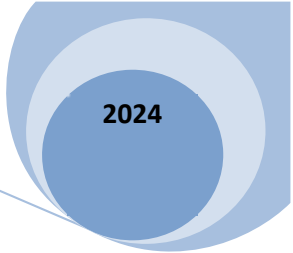
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran / Volume	Catatan
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROV KALTENG	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROV KALTENG	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PROV KALTENG	Tergunakannya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PROV KALTENG	Tersedianya jasa surat menyurat	1 tahun	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PROV KALTENG	Terlaksananya pelayanan umum kantor dan informasi publik	1 tahun	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PROV KALTENG	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025

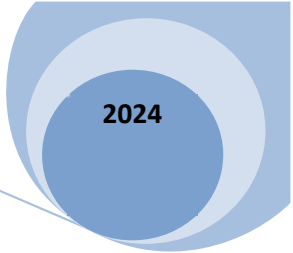


5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PROV KALTENG	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	200000 Lembar	
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PROV KALTENG	Tersedianya alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	4 Jenis	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PROV KALTENG	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai berupa koran dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	2 Media	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PROV KALTENG	Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya program dan kegiatan kepegawaian dan tersedianya makan minum rapat koordinasi pegawai selama 1 tahun	14 Kab/ Kota dan 3 Instansi Pusat	

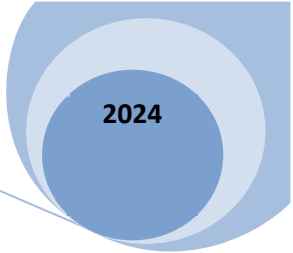
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PROV KALTENG	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROV KALTENG	Tersedianya BMD Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PROV KALTENG	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROV KALTENG	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemda	1 Tahun	
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PROV KALTENG	Perbaikan perlengkapan kerja yang rusak	200 Unit	
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PROV KALTENG	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Gedung	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PROV KALTENG	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan Terbayarkannya pajak kendaraan	30 Unit	



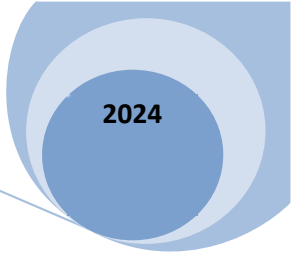
			bermotor selama 1 tahun		
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PROV KALTENG	Terpeliharanya secara rutin/berkala prasarana pendukung gedung kantor	37 Unit	
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun	
5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	PROV KALTENG	Terasuransikannya dan tertatanya aset dan inventarisasi BKD Prov Kalteng	1,491 Unit	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PROV KALTENG	Terkelolanya administrasi keuangan Daerah pada Perangkat Daerah	1 tahun	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PROV KALTENG	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PROV KALTENG	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan semesteran aset	1 Laporan	



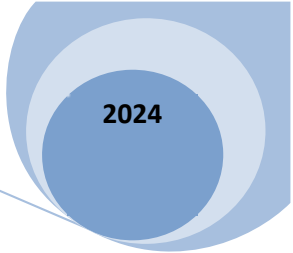
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PROV KALTENG	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROV KALTENG	Terkelolanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah	1 tahun	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PROV KALTENG	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 Dokumen	
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PROV KALTENG	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PROV KALTENG	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	1 tahun	
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PROV KALTENG	Tersedianya pengadaan pakaian dinas selama 1 tahun	150 Stel	



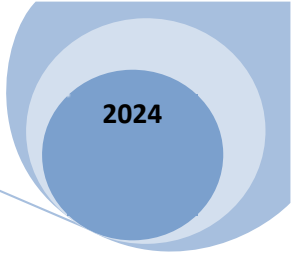
5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PROV KALTENG	Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	PROV KALTENG	Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROV KALTENG	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	1 tahun	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	PROV KALTENG	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	1 tahun	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PROV KALTENG	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	1 tahun	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	PROV KALTENG	Tertatanya Jabatan Fungsional di Pemprov Kalteng	800 SK	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	PROV KALTENG	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	1 tahun	



5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PROV KALTENG	Terkelolanya Kenaikan Pangkat PNS	4000 SK 400 Orang 400 Orang	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	PROV KALTENG	Terisinya Jabatan Struktural dan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemprov Kalteng	1 Kali 70 Orang	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	PROV KALTENG	Terlaksananya proses Mutasi PNS	2 kali	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PROV KALTENG	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN	1 tahun	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PROV KALTENG	Terkelolanya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan kasus cerai PNS	50 Laporan	
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PROV KALTENG	Terkelolanya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	250 PNS 2 Kegiatan	



5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	PROV KALTENG	Terlaksananya pengadaan PNS, administrasi pemberhentian PNS dan Informasi Kepegawaian PNS	1 tahun	
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PROV KALTENG	Terlaksananya pengadaan CPNS dan PPPK	40 Orang Capra 300 Orang CPNS	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PROV KALTENG	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	300 SK	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PROV KALTENG	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 tahun	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	PROV KALTENG	Terkelolanya Data Kepegawaian Pemerintah	10.000 Data PNS 1 Aplikasi	



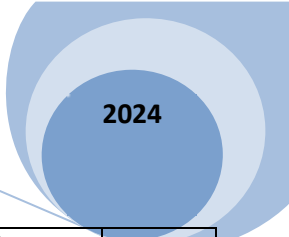
			Provinsi Kalimantan Tengah		
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PROV KALTENG	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	42 Kegiatan	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan telah melalui berbagai proses yang dilaksanakan bersama antar bidang dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah, juga telah melalui berbagai kajian mendalam dikaitkan dengan Renstra, sehingga diharapkan ketika telah dijadikan dokumen PPAS dan DPA pada saatnya nanti bisa dijadikan arahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

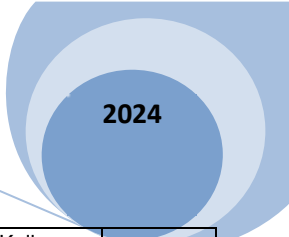
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Besaran		Catatan
	URUSAN PENUNJANG						
	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN						
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5.03.01.1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah	7	Dokumen	
5.03.01.1.01.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Realisasi Kinerja SKPD	10	Dokumen	
5.03.01.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	
5.03.01.1.02.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	
5.03.01.1.02.07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	1	Laporan	
5.03.01.1.03.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarkannya Asuransi Aset SKPD	100	Persen	
5.03.01.1.05.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai BKD	150	Stel	

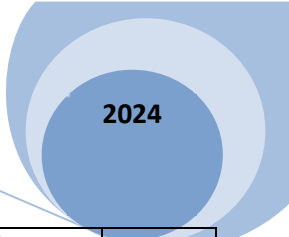


5.03.01.1.05.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	Orang	
5.03.01.1.05.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas PNS mengikuti Bimtek	10	Orang	
5.03.01.1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100	Persen	
5.03.01.1.06.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	
5.03.01.1.06.05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	Persen	
5.03.01.1.06.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan	100	Persen	
5.03.01.1.06.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Persen	
5.03.01.1.07.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi instalasi listrik kantor	100	Persen	
5.03.01.1.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	Persen	
5.03.01.1.08.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	Persen	
5.03.01.1.08.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	Persen	

5.03.01.1.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarkannya pajak kendaraan dinas bermotor milik SKPD	30	Unit	
5.03.01.1.09.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	Persen	
5.03.01.1.09.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	100	Persen	
5.03.01.1.09.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerinta han Daerah	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin AC milik SKPD	100	Persen	
5.03.02.1.01.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Capra IPDN yang lulus tes	40	Orang	
5.03.02.1.01.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS dan PPPK Provinsi yang lulus test	300	Orang	
5.03.02.1.01.06	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	300	SK	
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan kebugaran jasmani PN	10	Kali	



5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian PNS	30	Kali	
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Publikasi Hari KORPRI	1	Kali	
5.03.02.1.01.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya Rapat Kerja DPP KORPRI	1	Kali	
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya PPID BKD Provinsi Kalimantan Tengah	1	Laporan	
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tertatanya dokumen kepegawaian PNS Provinsi Kalimantan Tengah	100	Persen	
5.03.02.1.01.10	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terpublikasinya Informasi Kepegawaian Secara Online	100	Informasi	
5.03.02.1.01.11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya dan terkelolanya Data PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang up to date	10000	Data PNS	
5.03.02.1.01.11	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Tersedianya Program/Aplika si Kepegawaian SiTaguh online Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1	Aplikasi	
5.03.02.1.02.01	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Assesmen Mutasi PNS	2	Kali	
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS naik pangkat periode April dan Oktober	4000	SK	



5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I dan II	400	Orang	
5.03.02.1.02.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah	400	Orang	
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Assesmen Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1	Kali	
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural	1	Kali	
5.03.02.1.02.03	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	1	Kali	
5.03.02.1.03.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	100	Persen	
5.03.02.1.03.13	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Pejabat Fungsional Yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	1000	SK	
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS penerima Satyalancana Karya Satya Provinsi Kalimantan Tengah	250	PNS	
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	PNS yang membuat SKP Eselon II Provinsi Kalimantan Tengah	44	Orang	
5.03.02.1.04.04	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	2	Kegiatan	
5.03.02.1.04.08	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terselesaikanny a laporan yang berkaitan dengan tindak disiplin PNS dan perceraian PNS	50	Laporan	

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT****3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Seperti diketahui bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (pasal 5) dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Sejalan dengan diselenggarakannya Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001, kebijakan yang dilakukan adalah melakukan standarisasi kompetensi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur serta melaksanakan sistem komputerisasi administrasi kepegawaian.

Program yang dilaksanakan meliputi Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pendidikan Kedinasan, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, dan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan yang merupakan acuan bagi sub bidang/bagian dalam menjalankan tupoksinya, yang dijabarkan lagi dalam 61 kegiatan.

Sebagaimana diketahui, Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan capaian kinerja suatu program/kegiatan pada suatu unit kerja tertentu dalam suatu kurun waktu tertentu pula. Telaahan terhadap kinerja setidaknya dapat menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, Telaahan terhadap kinerja dimaksudkan juga untuk memberikan penilaian atas capaian suatu program/kegiatan akhir pelaksanaan program/kegiatan dan kebijakan pembangunan.

Dari hal tersebut, maka sebagai dasar dalam penilaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dilakukan pengukuran kinerja dalam rangka memudahkan Telaahan dan analisa lebih lanjut yang dapat dilihat dari Nilai Capaian Kelompok Indikator Kinerja.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

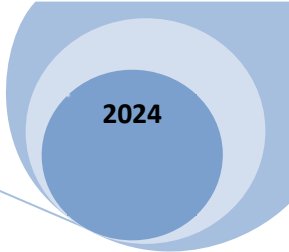
Sebagai penjabaran dari visi misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021-2026 yang ingin dicapai yaitu

A. Tujuan :

- Meningkatkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian.
- Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT.
- Meningkatkan SDM.
- Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur.

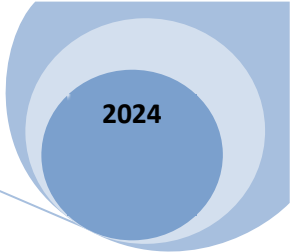
B. Sasaran :

- Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian.
- Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT.
- Meningkatnya SDM.
- Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.



3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA TAHUN ANGGARAN 2024

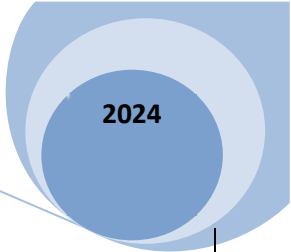
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 2 Program dan 12 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :



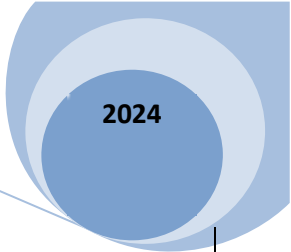
Tabel 3.3.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ;

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PROV KALTENG	1 tahun	12.726.783.400,00	PAD	-		12.726.783.400,00
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PROV KALTENG	1 tahun	1.365.000.000,00	PAD	-	1 tahun	1.365.000.000,00
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tergunakannya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	PROV KALTENG	12 laporan	475.000.000,00	PAD	-	12 laporan	475.000.000,00
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan umum kantor dan informasi publik	PROV KALTENG	12 laporan	890.000.000,00	PAD	-	12 laporan	890.000.000,00
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi	PROV KALTENG	1 tahun	2.406.755.400,00	PAD	-	1 tahun	2.406.755.400,00

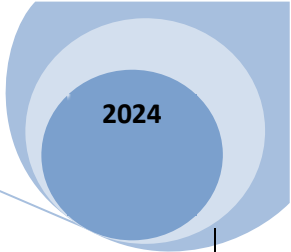
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025



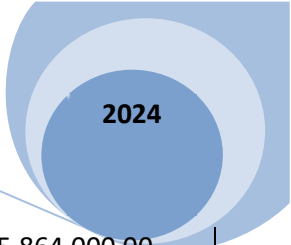
		Umum Perangkat Daerah							
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	PROV KALTENG	1200 Buah	75.976.500,00	PAD	-	1200 Buah	75.976.500,00
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	PROV KALTENG	4 Jenis	1.263.878.900,00	PAD	-	4 Jenis	1.263.878.900,00
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk pegawai berupa koran dan peraturan perundang undangan selama 1 tahun	PROV KALTENG	2 Media	37.000.000,00	PAD	-	2 Media	37.000.000,00
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya dan terkonsultasikannya program dan kegiatan kepegawaian dan tersedianya makan minum rapat koordinasi pegawai selama 1 tahun	PROV KALTENG	12 Laporan	1.000.000.000,00	PAD	-	12 Laporan	1.000.000.000,00



5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	PROV KALTENG	1 Paket	29.900.000,00	PAD	-	1 Paket	29.900.000,00
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROV KALTENG	1 Tahun	75.000.000,00	PAD	-	1 Tahun	75.000.000,00
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan gedung kantor	PROV KALTENG	1 Paket	75.000.000,00	PAD	-	1 Paket	75.000.000,00
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD penunjang urusan pemda	PROV KALTENG	1 Tahun	1.130.500.000,00	PAD	-	1 Tahun	1.130.500.000,00
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perbaikan perlengkapan kerja yang rusak	PROV KALTENG	200 Unit	32.500.000	PAD	-	200 Unit	32.500.000
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	PROV KALTENG	2 Gedung	800.000.000,00	PAD	-	2 Gedung	800.000.000,00
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Terpeliharanya kendaraan bermotor dan Terbayarkannya	PROV KALTENG	30 Unit	275.000.000,00	PAD	-	30 Unit	275.000.000,00



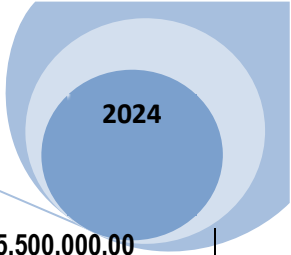
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajak kendaraan bermotor selama 1 tahun							
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya secara rutin/berkala prasarana pendukung gedung kantor	PROV KALTENG	37 Unit	23.000.000,00	PAD	-	37 Unit	23.000.000,00
5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	25.418.000,00	PAD	-	1 tahun	25.418.000,00
5.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terasuransikannya dan tertatanya aset dan inventarisasi BKD Prov Kalteng	PROV KALTENG	1,491 Unit	25.418.000,00	PAD	-	1,491 Unit	25.418.000,00
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi keuangan Daerah pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	7.421.393.000,00	PAD	-	1 tahun	7.421.393.000,00
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	PROV KALTENG	52 Orang / Bulan	7.390.000.000,00	DAU PAD	-	52 Orang / Bulan	7.390.000.000,00
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan semesteran aset	PROV KALTENG	1 Laporan	15.529.000,00	PAD	-	1 Laporan	15.529.000,00



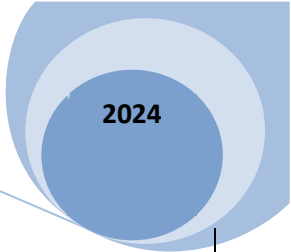
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	PROV KALTENG	1 Laporan	15.864.000,00	PAD	-	1 Laporan	15.864.000,00
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terkelolanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	162.231.000,00	PAD	-	1 tahun	162.231.000,00
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	PROV KALTENG	10 Laporan / Dokumen	84.166.000,00	PAD	-	10 Laporan / Dokumen	84.166.000,00
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	PROV KALTENG	7 Dokumen	78.065.000,00	PAD	-	7 Dokumen	78.065.000,00
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	140.486.000,00	PAD	-	1 tahun	140.486.000,00
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas selama 1 tahun	PROV KALTENG	100 Buah	75.000.000,00	PAD	-	100 Buah	75.000.000,00

5.03.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PROV KALTENG	5 Orang	10.000.000,00	PAD	-	5 Orang	10.000.000,00
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksanannya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	PROV KALTENG	100 Orang	55.486.000,00	PAD	-	100 Orang	55.486.000,00
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terkelolanya administrasi kepegawaian pada Perangkat Daerah	PROV KALTENG	1 tahun	12.288.500.000,00	PAD	-	1 tahun	12.288.500.000,00
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksanannya pengembangan kompetensi ASN	PROV KALTENG	1 tahun	83.000.000,00	PAD	-	1 tahun	83.000.000,00
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Seleksi dan Monitoring Tugas Belajar dan Ijin Belajar	PROV KALTENG	4 Dokumen	45.000.000,00	PAD	-	4 Dokumen	45.000.000,00
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tertatanya Jabatan Fungsional di Pemprov Kalteng	PROV KALTENG	800 SK	38.000.000,00	PAD	-	800 SK	38.000.000,00
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksanannya mutasi dan promosi ASN	PROV KALTENG	1 tahun	925.000.000,00	PAD		1 tahun	925.000.000,00

5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terkelolanya Kenaikan Pangkat PNS	PROV KALTENG	4800 Dokumen	200.000.000,00	PAD		4800 Dokumen	200.000.000,00
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terisinya Jabatan Struktural dan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemprov Kalteng	PROV KALTENG	800 Dokumen	650.000.000,00	PAD		800 Dokumen	650.000.000,00
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya proses Mutasi PNS	PROV KALTENG	100 Dokumen	75.000.000,00	PAD		100 Dokumen	75.000.000,00
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja ASN	PROV KALTENG	1 tahun	215.000.000,00	PAD		1 tahun	215.000.000,00
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terkelolanya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan kasus cerai PNS	PROV KALTENG	250 Orang	105.000.000,00	PAD		250 Orang	105.000.000,00
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terkelolanya Pemberian Penghargaan Bagi PNS	PROV KALTENG	250 PNS 2 Kegiatan	85.000.000,00	PAD		250 PNS 2 Kegiatan	85.000.000,00
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terkelolanya Dokumen Proses Izin Perceraian Bagi PNS	PROV KALTENG	10 Laporan	25.000.000	PAD		10 Laporan	25.000.000



5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan PNS, administrasi pemberhentian PNS dan Informasi Kepegawaian PNS	PROV KALTENG	1 tahun	11.065.500.000,00	PAD		1 tahun	11.065.500.000,00
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya pengadaan CPNS dan PPPK	PROV KALTENG	1 Laporan / Dokumen	275.000.000,00	PAD		1 Laporan / Dokumen	275.000.000,00
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Administrasi Pemberhentian pegawai purna tugas BUP	PROV KALTENG	300 Dokumen	78.000.000,00	PAD		300 Dokumen	78.000.000,00
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	PROV KALTENG	1 Dokumen	85.000.000,00	PAD		1 Dokumen	85.000.000,00
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian Pemerintah	PROV KALTENG	1 Dokumen	350.000.000,00	PAD		1 Dokumen	350.000.000,00



		Provinsi Kalimantan Tengah							
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan Profesi ASN (KORPRI)	PROV KALTENG	1 Lembaga	5.650.000.000,00	PAD		1 Lembaga	10.277.500.000,00
	TOTAL				21.591.908.845,00				25.015.283.400,00

Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dimana memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran rincian kegiatan, pengurangan sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas. Terdapat penambahan usulan PAGU pada **Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN** guna mempersiapkan pelaksanaan MTQ KORPRI tingkat Provinsi dan PESPARAWI Korpri tingkat Provinsi.

Kebutuhan dana Indikatif keseluruhan dari program dan kegiatan yang direncanakan sebesar **Rp. 21.591.908.845,-** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah. Selanjutnya, Renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A.Rencana Strategis

A.1 Pernyataan Visi dan Misi

Rencana Strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 – 2021 di buat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Adapun Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

VISI

“KALTENG maju, mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

**VISI – MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MISI

- 1. Pemantapan Tata Ruang Welsyah Provinsi
- 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
- 3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai
- 4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Pengetasan Kemiskinan
- 5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- 6. Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
- 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA)
- 8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber : Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2016-2021

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, BKD Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi kelima yaitu Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dalam lingkup bidang kepegawaian misi ini mengisyaratkan perlunya Badan Kepegawaian Daerah selaku unsur penunjang bidang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan reformasi birokrasi pada bidang manajemen ASN, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan Tujuan Strategis berdasarkan visi dan misi. Rumusan tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:



Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran perwakilan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Adapun isi sasaran strategis BKD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian***
- 2. Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT***
- 3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia***
- 4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur***
- 5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur***

Tabel 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKD (2016-2021)

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Jumlah aparatur yang terlayani	1050 Orang; 2720 SK	1350 Orang;; 2740 SK	1549 Orang; 2649 SK	1695 Orang; 3545 SK	2625 Orang; 4349 SK	4275 Orang; 4300 SK
		Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT	Jumlah Aparatur yang terdata	7000	8000	8500	9000	9500	10000
		Meningkatnya Kapasitas SDM	Jumlah aparatur yang berkualitas	200	225	250	275	300	325
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur yang dibina dan dikelola	840 Orang; 10 SK	854 Orang; 10 SK	904 Orang; 14 SK	920 Orang; 20 SK	1155 Orang; 20 SK	1240 Orang; 50 SK
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	6	6	7	7	8

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2016-2021

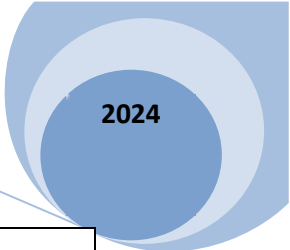
Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKD (2016-2021)

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian	Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kepegawaian	Penyelenggaraan survey indeks kepuasan pelayanan manajemen aparatur
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Standar Pelayanan kepegawaian
			Pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung pelayanan
			Peningkatan standar mutu layanan kepegawaian dengan memperbaiki SOP pelayanan yang transparan, sederhana, dan mudah dimengerti
			Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik di bidang kepegawaian
			Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang terkait langsung dengan pelayanan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Meningkatnya Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis IT	Upaya mewujudkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat informasi kepegawaian di Kalimantan Tengah	Pengembangan aplikasi SIMPEG sesuai dengan perkembangan dan perubahan teknologi informasi
			Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sistem informasi berbasis WEB
			Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja sistem informasi
			Sinkronisasi database kepegawaian antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan data sistem maupun pengembangan aplikasi
			Peremajaan data yang terprogram setiap triwulanan dalam 1 (satu) tahun
			Optimalisasi jaringan yang mendukung kelancaran updating database, serta kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan server database
			Verifikasi database yang dapat mendukung Website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar terintegrasi dengan database BKN dan Kabupaten/Kota
			Koneksisasi aplikasi sistem informasi kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan instansi terkait
			Penyelenggaraan pelayanan sistem informasi manajemen aparatur yang terintegrasi melalui penguatan database Aparatur Sipil Negara
3	Meningkatnya Kapasitas SDM	Upaya membentuk SDM yang bertanggung jawab, disiplin, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah dan harmonis	Pembekalan bagi aparatur yang akan purna tugas
			Pemberian tunjangan kinerja daerah dan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan kinerja pegawai
			Pengembangan nilai-nilai budaya kerja Aparatur Sipil Negara



No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penyelenggaraan sosialisasi, desiminasi tentang kedudukan hak dan kewajiban aparatur sipil negara serta netralitas pegawai
			Penegakkan peraturan disiplin aparatur, kode etik dan perilaku aparatur dan kode etik profesi
			Pemberian perbaikan tambahan penghasilan dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Merit sesuai dengan kompetensi	Rekrutmen Aparatur Sipil Negara secara terbuka, transparan, objektif, bebas KKN melalui sistem CAT
			Penyelenggaraan seleksi pengangkatan dalam jabatan secara terbuka, dan objektif
			Penataan dan pemberdayaan aparatur yang disesuaikan dengan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan beban kerja, serta hasil proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun
			Memberikan kemudahan peningkatan pendidikan pelatihan bagi aparatur sipil negara yang akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang menunjang tugas dan fungsi organisasi
			Penetapan jabatan administrasi, dan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sumber : Dokumen Perubahan Rencana Strategis BKD Prov. Kalteng 2016-2021

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						21.591.908.845,00							415.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.591.908.845,00							415.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						21.591.908.845,00							415.000.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	11.415.908.845,00						-	0,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	7.182.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	7.032.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	55.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	150.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.713.908.845,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	758.908.845,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.050.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1.050.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.075.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				39 Unit	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				100 Unit	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-			-	10.176.000.000,00						-	415.000.000,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	6.640.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	415.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	5.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	2.800.000.000,00			-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Laporan	750.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1.900.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	201.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	101.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina				600 Orang	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	535.000.000,00			-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-	-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				200 Orang	85.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				200 Orang	75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n pemerintah yang bersih, prof essional dan responsif dalam rangka percepatan pembangun an daerah	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	J U M L A H							21.591.908.845,00							415.000.000,00	

